Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
5 (3) 2025, Page: 28165-28172

Inovasi Program Satrolda oleh Ditpolairud Polda Jatim sebagai Langkah Menciptakan Rasa Aman

Azwa Safrina Alya[1], Ismail[2] , Tri Prasetijowati[3]
Universitas Bhayangkara Surabaya

Corresponding Author: Azwa Safrina Alya, e-mail: azwasafrinaalya@gmail.com

Published: Oktober, 2025

ABSTRAK

Dalam upaya menciptakan keamanan bagi masyarakat pesisir, Ditpolairud Polda Jawa Timur menghadirkan inovasi melalui program SATROLDA (Satuan Patroli Daerah). Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana inovasi tersebut dirancang dan diterapkan serta sejauh mana efektivitasnya dalam meningkatkan rasa aman dan partisipasi masyarakat. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, peneliti menggali dinamika pelaksanaan program, tantangan di lapangan, serta respon masyarakat pesisir terhadap keberadaan SATROLDA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini bukan sekadar kegiatan patroli rutin, melainkan bentuk nyata kehadiran negara yang responsif, humanis, dan partisipatif. Inovasi SATROLDA telah memberikan dampak positif dalam membangun kepercayaan publik, memperkuat kolaborasi antara aparat dan warga, serta menurunkan angka kejahatan laut. Namun, keberhasilan program ini sangat dipengaruhi oleh kesiapan personel, dukungan teknologi, dan partisipasi aktif masyarakat. Studi ini merekomendasikan penguatan sistem kolaboratif dan pemanfaatan teknologi secara berkelanjutan guna menjaga efektivitas inovasi di wilayah perairan.

Keywords: *Inovasi Kepolisian, Keamanan Pesisir, Program SATROLDA*

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Polri sebagai lembaga negara memiliki fungsi utama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat di seluruh wilayah Indonesia (Simamora & Simatupang, 2025). Dalam menjalankan fungsi tersebut, Polri berperan penting dalam memastikan stabilitas sosial dan politik yang menjadi fondasi keberlangsungan pembangunan nasional. Keberadaan Polri juga menjadi representasi negara dalam menjamin hak-hak warga untuk hidup aman dan tenteram di tengah dinamika masyarakat yang kompleks (Chairunisa & Zamhari, 2022). Selain itu, Polri dituntut untuk terus meningkatkan profesionalisme, integritas, dan transparansi dalam pelaksanaan tugas agar mendapatkan kepercayaan publik yang tinggi.

Keberadaan Polri memiliki akar sejarah panjang dalam perjuangan bangsa dan secara yuridis diatur melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai dasar hukum utama dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Sejak masa pasca-kemerdekaan, Polri telah mengalami berbagai transformasi kelembagaan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan tuntutan reformasi. Undang-undang tersebut menjadi landasan bagi Polri dalam menjalankan peran strategisnya sebagai penjaga keamanan negara sekaligus mitra masyarakat dalam menciptakan rasa aman. Dengan demikian, fungsi Polri tidak hanya bersifat represif tetapi juga preventif dan edukatif, sesuai dengan prinsip demokrasi dan penegakan hak asasi manusia (Manthovani, 2019).

Salah satu unsur pelaksana di lingkungan Polri adalah Ditpolairud (Direktorat Polisi Perairan dan Udara) yang memiliki tugas menjaga keamanan wilayah perairan dan udara. Di Jawa Timur, Ditpolairud Polda Jatim bertanggung jawab atas pengawasan, patroli, serta penindakan kejahatan di

laut seperti penyelundupan, perompakan, hingga potensi terorisme. Selain itu, Ditpolairud juga berperan dalam meningkatkan kapasitas personelnya agar mampu melaksanakan tugas secara lebih efektif dan efisien (Sulistiyanto, 2023).

Seiring perkembangan zaman, Ditpolairud dituntut untuk melakukan inovasi peran dalam menjaga keamanan wilayah pesisir. Tantangan di masyarakat pesisir yang semakin kompleks menuntut keterlibatan teknologi dan pendekatan baru dalam operasi kepolisian. Program dan kebijakan yang berbasis kebutuhan masyarakat lokal menjadi kunci dalam menciptakan keamanan dan keberlanjutan wilayah perairan. Oleh karena itu, Ditpolairud Polda Jatim mendorong penerapan strategi keamanan berbasis kolaborasi lintas sektor (Darma, 2019).

Salah satu inovasi yang telah dikembangkan adalah Program Satrolda (Satuan Patroli Daerah)**,** yaitu program pengamanan wilayah perairan berbasis partisipasi masyarakat. Program ini menekankan pemanfaatan teknologi digital dalam pemantauan aktivitas di laut, serta peningkatan respons cepat terhadap situasi darurat (Soldi et al., 2020). Dengan adanya Satrolda, diharapkan tercipta sistem patroli yang lebih efektif, terintegrasi, dan sesuai dengan kebutuhan lokal masyarakat pesisir. Keberhasilan program inovatif seperti Satrolda tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada interaksi dan dinamika internal organisasi**.** Peran setiap bagian dalam kapal polisi, misalnya nakhoda, sangat penting dalam menjaga koordinasi dan efektivitas tim. Selain itu, Ditpolairud Polda Jatim juga membutuhkan pelatihan intensif serta alokasi sumber daya memadai agar anggota siap menghadapi tantangan operasional maupun administratif di lapangan.

Penelitian ini menyoroti adanya perbedaan fokus dibandingkan studi sebelumnya yang cenderung menekankan aspek kebijakan atau penegakan hukum semata. Penelitian ini lebih menekankan pada kombinasi inovasi teknologi dengan pendekatan humanis dalam penyusunan strategi keamanan perairan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi teoritis dalam wacana ilmiah, tetapi juga saran praktis bagi Ditpolairud Polda Jatim dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat pesisir.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul "Inovasi Ditpolairud Polda Jatim dalam Menjalankan Peran Tugas Menciptakan Rasa Aman melalui Program Satrolda (Satuan Patroli Daerah)". Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk inovasi yang dilakukan Ditpolairud dalam program Satrolda, menganalisis faktor yang mempengaruhi implementasi program, serta menilai efektivitasnya dalam meningkatkan rasa aman masyarakat pesisir Jawa Timur.

Inovasi yang dilakukan Ditpolairud Polda Jawa Timur melalui Program SATROLDA menekankan pentingnya pendekatan baru yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat pesisir. Program ini tidak hanya berfokus pada aspek teknologi modern atau perubahan struktur organisasi, tetapi juga pada bagaimana aparat kepolisian mampu membangun kedekatan, kepercayaan, serta rasa aman psikologis dan sosial bagi masyarakat yang mereka layani. Dengan demikian, SATROLDA hadir sebagai bentuk layanan kepolisian yang menyeluruh, bukan semata penegakan hukum.

Menurut teori inovasi organisasi yang dikemukakan oleh (Sung & Kim, 2021), inovasi tidak berhenti pada produk atau kebijakan akhir, melainkan merupakan proses dengan empat perilaku inti: eksplorasi ide, penciptaan ide, advokasi ide, dan implementasi ide. Dalam konteks Ditpolairud, eksplorasi ide tampak dari upaya memahami kebutuhan keamanan unik masyarakat pesisir. Penciptaan ide diwujudkan melalui lahirnya Program SATROLDA, yang menggabungkan patroli keamanan dengan pendekatan sosial-edukatif. Advokasi ide dilakukan oleh personel sebagai agen perubahan, sementara implementasi terlihat dari patroli rutin dan kegiatan sosial di lapangan.

Inovasi tersebut erat kaitannya dengan teori Hierarki Kebutuhan Maslow**,** yang menempatkan rasa aman sebagai kebutuhan dasar kedua setelah kebutuhan fisiologis (Bowen, 2021). Masyarakat pesisir menghadapi berbagai ancaman seperti penyelundupan dan kejahatan laut yang berpotensi menimbulkan kecemasan. Kehadiran aparat Ditpolairud melalui SATROLDA tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai penyedia rasa aman yang memungkinkan masyarakat menjalani kehidupan sehari-hari dengan tenteram.

Ketika kebutuhan rasa aman ini terpenuhi, masyarakat dapat bergerak ke tahap kebutuhan lebih tinggi, seperti membangun hubungan sosial, memperoleh penghargaan, dan mencapai aktualisasi diri. Dalam konteks SATROLDA, hal ini tercermin ketika masyarakat tidak lagi sekadar objek

perlindungan, tetapi turut menjadi subjek yang berperan aktif dalam sistem keamanan wilayah pesisir. Dengan demikian, program ini tidak hanya menjaga keamanan fisik, melainkan juga memperkuat integrasi sosial masyarakat.

Penggabungan teori De Jong & Den Hartog dengan Maslow menunjukkan bahwa inovasi SATROLDA bersifat holistik. Ia tidak hanya menyentuh dimensi struktural organisasi kepolisian, tetapi juga menjawab kebutuhan emosional dan sosial masyarakat. Inovasi ini menegaskan bahwa pelayanan publik yang efektif adalah yang berorientasi pada manusia (human-centered), di mana teknologi dan prosedur hanyalah sarana untuk menciptakan lingkungan yang aman, bermakna, dan berkelanjutan.

Selain itu, perspektif (Darmareja et al., 2024) dalam teori sosiologi memperkaya pemahaman tentang SATROLDA. Ia menekankan bahwa struktur sosial, tindakan sosial, dan relasi kekuasaan saling berinteraksi dalam membentuk realitas sosial. Dalam konteks ini, hubungan antara Ditpolairud dan masyarakat pesisir tidak hanya dipahami sebagai kewenangan formal negara, tetapi juga sebagai proses sosial dinamis yang dipengaruhi oleh kepercayaan, interaksi, dan kolaborasi. Dengan demikian, SATROLDA dapat dipandang sebagai wujud transformasi hubungan negara dan masyarakat menuju pola kemitraan yang lebih partisipatif

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena bertujuan menggambarkan secara mendalam inovasi Ditpolairud Polda Jawa Timur melalui Program SATROLDA dalam meningkatkan rasa aman masyarakat pesisir. Lokasi penelitian berada di wilayah kerja Ditpolairud Polda Jatim, Surabaya, serta beberapa titik pesisir Jawa Timur yang menjadi fokus pelaksanaan program. Subjek penelitian dipilih dengan purposive sampling**,** terdiri dari 21 personel Ditpolairud yang terlibat langsung dalam SATROLDA dan 20 nelayan sebagai representasi masyarakat pesisir.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi**.** Wawancara digunakan untuk menggali pengalaman, makna, serta persepsi dari aparat dan masyarakat, sementara dokumentasi berupa laporan kegiatan, SOP, dan catatan resmi Ditpolairud digunakan untuk memperkuat temuan. Penggunaan triangulasi sumber data dilakukan untuk menjaga kredibilitas hasil penelitian. Data yang terkumpul dianalisis dengan model Miles, Huberman & Saldaña**,** meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Proses analisis ini tidak hanya menyajikan fakta teknis, tetapi juga menekankan pemahaman kontekstual, sosial, dan kultural dari inovasi SATROLDA. Dengan demikian, metode penelitian ini mampu menghadirkan gambaran komprehensif tentang bagaimana Ditpolairud berinovasi dalam menjaga keamanan masyarakat pesisir

HASIL DAN DISKUSI

Inovasi Ditpolairud Jatim melalui Program SATROLDA dan Kontribusinya terhadap Peningkatan Keamanan Masyarakat Pesisir di Jawa Timur

Program SATROLDA (Satuan Patroli Perairan dan Udara) yang dilaksanakan oleh Ditpolairud Polda Jawa Timur hadir sebagai jawaban atas tantangan keamanan di wilayah pesisir yang kerap menghadapi ancaman nyata seperti penyelundupan, pencurian hasil laut, hingga konflik wilayah tangkap antar nelayan. Inovasi ini menunjukkan transformasi strategi kepolisian dari yang semula bersifat represif menjadi lebih partisipatif dan humanis. Dengan memadukan fungsi patroli rutin serta pendekatan sosial, SATROLDA dirancang untuk menciptakan rasa aman yang lebih menyeluruh di kalangan masyarakat pesisir (Rifai & Haeril, 2024).

Salah satu bentuk inovasi penting dalam program ini adalah Sambang Nusa, yaitu kegiatan yang mengedepankan komunikasi langsung antara aparat kepolisian dan masyarakat pesisir. Melalui kunjungan rutin ke kampung nelayan, aparat Ditpolairud tidak hanya menyampaikan pesan keamanan, tetapi juga mendengarkan keluhan dan aspirasi warga. Pola interaksi dua arah ini menciptakan ruang kepercayaan yang lebih kuat sehingga masyarakat merasa bahwa kepolisian hadir bukan sekadar sebagai penegak hukum, melainkan mitra dalam menjaga ketertiban bersama (Hartuti et al., 2022).

Selain Sambang Nusa, Ditpolairud juga mengembangkan program Cakpoyan dan Polisi RW yang menempatkan masyarakat sebagai aktor penting dalam upaya pengawasan keamanan laut. Melalui pola ini, masyarakat dilibatkan secara aktif untuk memberikan informasi, memantau lingkungan, serta terlibat langsung dalam kegiatan pembinaan. Pendekatan ini menumbuhkan rasa kepemilikan terhadap program keamanan yang dijalankan, sehingga tercipta sinergi yang lebih kokoh antara aparat dan masyarakat.

Dari sisi operasional, SATROLDA juga memanfaatkan teknologi sederhana yang disesuaikan dengan kondisi lapangan, seperti GPS, radio komunikasi, dan pencatatan digital patroli. Walaupun peralatan yang digunakan masih terbatas, pemanfaatan teknologi ini mampu meningkatkan efektivitas patroli dan kecepatan respon aparat dalam menghadapi potensi gangguan keamanan di laut. Hal ini memperlihatkan bahwa inovasi tidak harus berbasis teknologi mutakhir, melainkan pada kemampuan adaptasi dan optimalisasi sumber daya yang ada.

Hasil dari inovasi yang diterapkan ini mulai dirasakan secara nyata oleh masyarakat pesisir. Tingkat kejahatan laut mengalami penurunan di beberapa daerah yang menjadi fokus program, sementara rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap aparat kepolisian semakin meningkat. Lebih dari itu, masyarakat pesisir merasa keberadaannya lebih dihargai karena kepolisian tidak hanya hadir sebagai pengendali, tetapi juga sebagai pendengar dan fasilitator kebutuhan lokal.[5]

Keberhasilan SATROLDA dalam menciptakan keamanan juga memperlihatkan bagaimana inovasi yang berbasis partisipasi masyarakat mampu memperkuat dimensi sosial dan kultural di wilayah pesisir. Program ini menumbuhkan kesadaran kolektif warga untuk ikut menjaga wilayah perairan mereka, yang pada gilirannya membentuk pola kerja sama yang lebih erat antara masyarakat dan aparat. Dengan demikian, keamanan tidak hanya menjadi tanggung jawab kepolisian, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat pesisir (Titah Dewanti et al., 2023).

Secara keseluruhan, program SATROLDA menunjukkan bahwa inovasi kepolisian yang mengedepankan pendekatan kolaboratif mampu menjawab tantangan keamanan di wilayah pesisir secara lebih komprehensif. Kontribusi yang dihasilkan tidak hanya terlihat dalam aspek teknis berupa patroli dan pengawasan laut, tetapi juga dalam wujud nyata kehadiran negara yang responsif, humanis, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan model semacam ini, Ditpolairud Polda Jawa Timur berhasil membangun jembatan kepercayaan yang memperkuat posisi kepolisian di tengah masyarakat pesisir.

Faktor yang Mempengaruhi Inovasi Ditpolairud Polda Jatim dalam Program SATROLDA

Keberhasilan inovasi Ditpolairud Polda Jawa Timur melalui program SATROLDA tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor yang saling berhubungan. Faktor-faktor ini berperan baik sebagai pendukung maupun tantangan dalam pelaksanaan program, sehingga menentukan sejauh mana program dapat berjalan efektif. Secara umum, pengaruh tersebut terbagi menjadi aspek internal organisasi, dukungan eksternal masyarakat dan pemerintah, serta faktor manusia sebagai aktor utama dalam inovasi.

Dari sisi internal, struktur organisasi Ditpolairud, ketersediaan sarana prasarana, serta alokasi anggaran menjadi penentu utama dalam pelaksanaan SATROLDA. Dukungan sistem organisasi yang solid memudahkan koordinasi antara unit patroli, bagian pembinaan masyarakat, hingga sektor teknis operasional. Namun, apabila sistem pelaporan atau komunikasi internal kurang berjalan efektif, maka hal tersebut dapat menjadi hambatan yang signifikan. Faktor internal ini menunjukkan bahwa inovasi tidak dapat dilepaskan dari kekuatan kelembagaan yang menopangnya. Selain itu, pembinaan sumber daya manusia juga menjadi aspek krusial dalam memperkuat kapasitas internal agar mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan kerja. Kompetensi personel yang mumpuni dapat meningkatkan efisiensi dan ketepatan dalam pengambilan keputusan strategis. Di sisi lain, kurangnya pelatihan dan peningkatan kapasitas dapat menyebabkan rendahnya responsivitas terhadap situasi di lapangan. Oleh karena itu, sinergi antara struktur organisasi, sumber daya manusia, dan sistem manajemen menjadi fondasi penting untuk mendorong keberhasilan implementasi SATROLDA secara berkelanjutan.

Selain aspek organisasi, faktor eksternal juga sangat memengaruhi keberhasilan program. Masyarakat pesisir yang memiliki keterbukaan, partisipasi aktif, dan kesediaan bekerja sama dengan aparat menjadi modal sosial penting dalam menjalankan SATROLDA. Di wilayah yang warganya antusias, program berjalan lebih cepat dan diterima dengan baik. Sebaliknya, di wilayah yang masyarakatnya masih skeptis atau pernah memiliki pengalaman buruk dengan aparat, program membutuhkan pendekatan yang lebih intensif agar bisa diterima (Kristina, 2024).

Dukungan pemerintah daerah dan pihak ketiga seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM) pesisir juga menjadi bagian penting dari faktor eksternal. Keterlibatan mereka dalam menyediakan fasilitas pendukung, menggelar pelatihan, atau sekadar memberikan legitimasi politik terhadap program SATROLDA mampu memperluas jangkauan dan keberlanjutan inovasi. Kolaborasi lintas sektor inilah yang memperlihatkan bahwa inovasi kepolisian tidak bisa berjalan sendiri, melainkan memerlukan jejaring yang lebih luas.

Selain faktor internal dan eksternal kelembagaan, aspek manusia merupakan elemen yang paling menentukan. Aparat Ditpolairud yang melaksanakan SATROLDA dituntut bukan hanya memiliki kemampuan teknis dalam patroli, tetapi juga sensitivitas sosial dan empati dalam berinteraksi dengan masyarakat pesisir. Aparat yang mampu membangun komunikasi dengan hati terbukti lebih mudah diterima masyarakat, sehingga memperkuat efektivitas program. Dengan demikian, faktor manusia menjadi inti keberhasilan inovasi (Hartanto, 2020).

Partisipasi masyarakat pesisir sendiri juga tidak bisa diremehkan. Warga yang merasa memiliki tanggung jawab terhadap keamanan wilayahnya akan lebih aktif terlibat dalam kegiatan patroli sosial, memberikan informasi penting, serta menjaga ketertiban di lingkungannya. Kesadaran kolektif ini memperlihatkan bahwa rasa aman tidak hanya dibentuk oleh aparat, tetapi juga oleh masyarakat yang menjadi penerima manfaat langsung. Sinergi manusia dari dua sisi ini aparat dan warga menjadi kunci keberlangsungan program. Dukungan masyarakat terhadap program keamanan tidak hanya terbatas pada partisipasi aktif, tetapi juga pada pembentukan jaringan informasi yang efisien dan cepat. Ketika masyarakat merasa dihargai dalam upaya menjaga keamanan, mereka akan lebih proaktif dalam melaporkan potensi ancaman atau kejadian yang mencurigakan. Selain itu, peran serta warga dalam mengedukasi sesama anggota komunitas mengenai pentingnya menjaga keamanan juga memperkuat kapasitas kolektif dalam merespons situasi darurat. Dengan demikian, kemitraan antara aparat keamanan dan masyarakat menjadi elemen vital dalam menciptakan sistem keamanan yang berkelanjutan dan responsif terhadap tantangan zaman.

Keseluruhan faktor tersebut menunjukkan bahwa inovasi SATROLDA dipengaruhi oleh kombinasi antara kekuatan internal, dukungan eksternal, dan kualitas manusia di dalamnya. Tanpa adanya keseimbangan dari ketiga unsur tersebut, program tidak akan mencapai hasil yang maksimal. Oleh karena itu, keberhasilan SATROLDA bukan hanya tentang inovasi teknis atau strategi formal, melainkan tentang bagaimana faktor-faktor tersebut dapat dipadukan secara sinergis untuk mewujudkan rasa aman yang berkelanjutan di wilayah pesisir Jawa Timur.

Upaya Ditpolairud Polda Jatim dalam Menciptakan Rasa Aman bagi Masyarakat Pesisir melalui Program SATROLDA

Upaya Ditpolairud Polda Jawa Timur dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat pesisir melalui program SATROLDA berangkat dari kesadaran bahwa keamanan laut bukan hanya persoalan teknis patroli, tetapi juga mencakup dimensi sosial, budaya, dan psikologis masyarakat pesisir. Dalam konteks ini, Ditpolairud menempatkan dirinya tidak semata sebagai aparat penegak hukum, melainkan juga sebagai mitra strategis masyarakat dalam menjaga ketertiban dan mengatasi berbagai ancaman di wilayah perairan.

Salah satu upaya utama yang dilakukan adalah penguatan kapasitas personel melalui pelatihan berkelanjutan. Personel Ditpolairud dipersiapkan bukan hanya dalam hal keterampilan teknis seperti navigasi, patroli, dan penggunaan teknologi komunikasi, tetapi juga dalam aspek sosial-kultural. Hal ini penting karena aparat dituntut memiliki kemampuan berinteraksi dengan masyarakat secara empatik dan membangun komunikasi yang efektif, sehingga program SATROLDA tidak dipandang kaku, melainkan hadir secara manusiawi di tengah warga pesisir. Materi pelatihan mencakup modul

komunikasi lintas budaya, teknik mediasi dasar, dan prinsip keselamatan serta etika layanan kesehatan lapangan. Evaluasi kompetensi dilakukan berkala melalui simulasi skenario, penilaian berbasis rubrik, dan umpan balik 360 derajat dari tokoh masyarakat serta mitra layanan. Skema peningkatan kapasitas diperkuat dengan mentoring on-the-job, pembelajaran reflektif pasca-misi (after-action review), dan sertifikasi internal agar standar profesionalisme terjaga konsisten di setiap satuan.

Selain itu, Ditpolairud juga mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana meskipun dalam kondisi terbatas. Kapal patroli, GPS, serta sistem komunikasi sederhana dimanfaatkan secara maksimal untuk menjaga efektivitas patroli di lapangan. Keterbatasan fasilitas ini tidak menjadi penghalang, melainkan justru memacu kreativitas aparat dalam mengembangkan strategi operasional yang lebih fleksibel. Sinergi antarunit dan pelibatan masyarakat sebagai sumber informasi juga membantu menutupi kekurangan peralatan (Sururi, 2017).

Pendekatan partisipatif menjadi upaya lain yang sangat penting dalam SATROLDA. Melalui kegiatan seperti Sambang Nusa, Cakpoyan, dan Polisi RW, Ditpolairud menjalin komunikasi dua arah dengan masyarakat pesisir. Program ini menempatkan warga sebagai mitra sekaligus pengawas sosial dalam menjaga keamanan wilayah laut. Dengan demikian, rasa aman yang diciptakan bukan hanya hasil intervensi aparat, tetapi juga kesadaran kolektif masyarakat yang ikut terlibat aktif.

Ditpolairud juga berupaya menjalin koordinasi dengan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan LSM pesisir dalam rangka memperkuat legitimasi serta keberlanjutan program SATROLDA. Kolaborasi lintas sektor ini memungkinkan program berjalan lebih luas dan mampu menyasar persoalan keamanan yang kompleks, seperti penyelundupan dan konflik wilayah tangkap. Dukungan eksternal ini membuktikan bahwa rasa aman di wilayah pesisir merupakan hasil kerja sama banyak pihak, bukan semata tanggung jawab kepolisian. Kerja sama ini juga membuka ruang bagi penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran, berdasarkan input dari berbagai pihak yang terlibat. Melalui pendekatan ini, Ditpolairud dapat memperluas jangkauan operasional dan meningkatkan efektivitas program, dengan melibatkan komunitas lokal yang lebih mengenal potensi ancaman di wilayahnya. Dengan adanya keterlibatan aktif dari berbagai sektor, keberhasilan program SATROLDA akan lebih terjamin dalam jangka panjang. Selain itu, kolaborasi ini turut memperkuat hubungan antara aparat dan masyarakat, yang pada akhirnya menciptakan rasa saling percaya dan tanggung jawab bersama terhadap keamanan wilayah pesisir.

Selain fokus pada aspek kelembagaan dan partisipasi, Ditpolairud juga menunjukkan adaptasi yang baik terhadap tantangan alam. Kondisi cuaca ekstrem, gelombang tinggi, serta daerah yang sulit dijangkau tidak jarang menjadi kendala dalam patroli laut. Namun, dengan melakukan penyesuaian rute, penjadwalan ulang, serta melibatkan masyarakat lokal sebagai pemantau kondisi perairan, Ditpolairud berhasil mengurangi risiko sekaligus memastikan keamanan tetap terjaga. Keseluruhan upaya tersebut memperlihatkan bahwa SATROLDA bukan hanya program teknis, melainkan bentuk kehadiran negara yang adaptif, empatik, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat pesisir. Dengan menggabungkan penguatan personel, optimalisasi sarana, pendekatan partisipatif, kolaborasi lintas sektor, serta adaptasi terhadap tantangan alam, Ditpolairud berhasil menghadirkan rasa aman yang lebih menyeluruh. Hal ini menunjukkan bahwa inovasi dalam keamanan publik tidak cukup hanya berorientasi pada instrumen hukum, tetapi juga pada keterlibatan manusia, nilai sosial, dan kemampuan adaptasi terhadap realitas lokal (Panji et al., 2025).

Keberhasilan program ini sangat dipengaruhi oleh faktor internal, eksternal, dan terutama faktor manusia. Faktor internal meliputi struktur organisasi, koordinasi antarunit, serta dukungan anggaran yang memungkinkan program berjalan sistematis. Faktor eksternal mencakup dukungan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan kondisi sosial-ekonomi pesisir. Namun, faktor manusia menjadi fondasi utama karena dedikasi aparat dan keterbukaan masyarakat menjadi kunci terjalinnya kepercayaan. Relasi sosial yang terbangun menjadikan rasa aman tidak lagi semata tanggung jawab negara, tetapi juga komitmen kolektif masyarakat pesisir.

Dalam menghadapi keterbatasan, Ditpolairud menunjukkan upaya adaptif melalui peningkatan kapasitas personel, optimalisasi sarana prasarana, serta pendekatan partisipatif. Keterbatasan peralatan dan tantangan alam diatasi dengan sinergi antarunit dan pelibatan masyarakat sebagai mitra strategis. Melalui strategi tersebut, Ditpolairud membuktikan bahwa menciptakan rasa

aman bukan hanya soal kehadiran fisik aparat, melainkan juga soal membangun rasa percaya, kedekatan emosional, dan komitmen bersama dengan masyarakat pesisirn. Agar program SATROLDA semakin berdampak luas, diperlukan pengembangan inovasi secara berkelanjutan. Ditpolairud perlu memperluas bentuk kreativitas program, misalnya melalui edukasi literasi hukum, pelatihan tanggap darurat bencana laut, serta forum keamanan berbasis masyarakat. Publikasi kegiatan, sosialisasi daring, dan kolaborasi lintas sektor juga penting dilakukan untuk memperkuat identitas SATROLDA sebagai program unggulan Ditpolairud Jatim yang humanis, terbuka, dan adaptif.

Dari sisi kelembagaan, Ditpolairud disarankan untuk memperkuat iklim organisasi yang suportif dengan membuka ruang inovasi dari bawah, mengapresiasi personel yang berinovasi, dan meningkatkan efektivitas komunikasi lintas unit. Pemerintah daerah serta lembaga terkait diharapkan memberikan dukungan kebijakan dan anggaran agar keberlangsungan program tidak terkendala faktor logistik.Terakhir, dari sisi masyarakat, penting untuk terus menumbuhkan kesadaran kolektif dan rasa kepemilikan bersama terhadap keamanan pesisir. Keterlibatan warga dapat diperkuat melalui pembentukan relawan keamanan laut, tokoh penggerak masyarakat, hingga forum komunikasi pesisir. Dengan demikian, SATROLDA bukan hanya program kepolisian, tetapi menjadi gerakan bersama yang tumbuh dari kolaborasi aparat dan warga, demi terciptanya keamanan yang berkelanjutan di wilayah pesisir Jawa Timur

KESIMPULAN

Inovasi Ditpolairud Polda Jawa Timur melalui Program SATROLDA terbukti menjadi strategi efektif dalam meningkatkan keamanan masyarakat pesisir. Program ini tidak hanya menghadirkan patroli rutin, tetapi juga membangun interaksi sosial melalui kegiatan seperti Sambang Nusa, Cakpoyan, dan Polisi RW. Inovasi tersebut berhasil memperkuat rasa aman baik secara fisik maupun psikologis, sekaligus menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat kepolisian. Partisipasi aktif warga dalam pengawasan laut serta pemanfaatan teknologi sederhana memperlihatkan bahwa SATROLDA mampu menyentuh akar persoalan di wilayah pesisir dengan pendekatan yang adaptif dan empatik.

UCAPAN TERIMAKASIH

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ditpolairud Polda Jawa Timur atas inovasi luar biasa yang telah dihadirkan melalui Program SATROLDA. Program ini tidak hanya meningkatkan rasa aman bagi masyarakat pesisir, tetapi juga menciptakan sinergi yang erat antara aparat kepolisian dan warga setempat. Dengan pendekatan yang responsif, humanis, dan berbasis partisipasi masyarakat, SATROLDA telah memperkuat rasa kepercayaan publik dan memberikan dampak positif dalam mengurangi kejahatan laut. Terima kasih juga kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam keberhasilan program ini, baik dari internal Ditpolairud, masyarakat pesisir, maupun pihak terkait lainnya, yang terus mendukung untuk terciptanya keamanan yang berkelanjutan.

REFERENSI

Bowen, B. (2021). The Matrix of Needs: Reframing Maslow's Hierarchy. *Health*, *13*(05), 538–563. https://doi.org/10.4236/health.2021.135041

Chairunisa, E. D., & Zamhari, A. Z. (2022). Pengembangan E-Modul Strategi Pembelajaran Sejarah dalam Upaya Peningkatan Literasi Digital Mahasiswa. *Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah*, *11*(1), 84–96. https://doi.org/10.36706/jc.v11i1.16047

Darma, R. (2019). *Inovasi Peran Kepolisian dalam Keamanan Pesisir*. Prenadamedia.

Darmareja, R., Utami, G. T., Anggraeni, D. T., Zahra, N. T., Isnainyah, M., & Mawaddah, F. (2024). Penguatan Pengetahuan dan Sikap Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Penyuluhan Kesehatan Mengenai Hipertensi Emergensi sebagai Upaya Pencegahan Kondisi Kegawatdaruratan. *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)*, *7*(2), 823–836. https://doi.org/10.33024/jkpm.v7i2.13105

Hartanto, D. (2020). Model Hierarki Komunikasi Organisasi Badan Reserse Dan Kriminal Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim Polri). *Komunikologi: Jurnal Pengembangan Ilmu Komunikasi Dan Sosial*, *4*(2), 111. https://doi.org/10.30829/komunikologi.v4i2.8480

Hartuti, E. T. K., Narimawati, U., Affandi, A., Priadana, S., & Erlangga, H. (2022). Pengaruh Inovasi Produk dan Persepsi Konsumen terhadap Keputusan Pembelian serta Implikasinya pada Citra Perusahaan UMKM Makanan Tradisional Getuk Goreng di Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, *5*(4), 1144–1149.
Kristina, A. (2024). *Teknik wawancara dalam penelitian kualitatif*. Deepublish.
Manthovani, R. (2019). KONTRIBUSI KEJAKSAAN RI UNTUK KONSEP BELA NEGARA TERHADAP PERLINDUNGAN MASYARAKAT. *Jurnal Magister Ilmu Hukum: Hukum Dan Kesejahteraan*, *4*(2).
Panji, A., Pameling, S., Nirwana, R., Mauliya, A. R., Sari, R. M., Anggraini, A. D., & Laksono, D. A. (2025). Nusantara Community Empowerment Review Revitalisasi Ruang Publik melalui Taman Jimpitan dan Mural Pojok Djadoel sebagai. *Nusantara Community Empowerment Review*, *3*(1), 112–117.
Rifai, R., & Haeril, H. (2024). Integrasi Kebijakan Publik dan Pengelolaan Sumber Daya Alam untuk Pembangunan Pesisir di Kabupaten Bima. *Journal of Governance and Local Politics …*, *6*(1), 25–36. https://journal.unpacti.ac.id/index.php/JGLP/article/view/1235
Simamora, J., & Simatupang, L. D. (2025). Penguatan Kedudukan dan Kewenangan Konstitusional Polri sebagai Alat Negara dalam Bidang Keamanan dan Ketertiban. *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, *15*(2), 159–181. https://doi.org/10.22212/jnh.v15i2.4424
Soldi, G., Gaglione, D., Forti, N., Di Simone, A., Daffina, C., Bottini, G., Quattrociocchi, D., Braca, P., Carniel, S., Willett, P., Riccio, D., Iodice, A., Farina, A., & Millefiori, L. (2020). Space-Based Global Maritime Surveillance. Part II: Artificial Intelligence and Data Fusion Techniques. *IEEE Aerospace and Electronic Systems Magazine*, *36*. https://doi.org/10.1109/MAES.2021.3070884
Sulistiyanto, A. (2023). Peran Kapal Polisi dalam Menunjang Efektivitas Ditpolairud. *Jurnal Ilmu Kepolisian*.
Sung, W., & Kim, C. (2021). A Study on the Effect of Change Management on Organizational Innovation: Focusing on the Mediating Effect of Members' Innovative Behavior. In *Sustainability* (Vol. 13, Issue 4). https://doi.org/10.3390/su13042079
Sururi, A. (2017). Inovasi Kebijakan Publik (Tinjauan Konseptual Dan Empiris). *Sawala : Jurnal Administrasi Negara*, *4*(3), 1–14. https://doi.org/10.30656/sawala.v4i3.241
Titah Dewanti, T., Harsen, F., Cipta Apsari, N., Tri Raharjo, S., Humaedi, S., Muhammad Taftazani, B., Budiarti Santoso, M., Hulu Sanga Sanga, P., Kartanegara, K., & Timur, K. (2023). Kecamatan Muara Badak. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 43–52.